



Peran Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) Dalam Mendukung Pembangunan Desa Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Milla Achliza Putri, Taryono, Selly Prima Desweni

Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: August 26, 2023
Revised: November 14, 2023
Available online: December 10, 2023

KEYWORDS

BUMKam, Income, Public Welfare

CORRESPONDENCE

Name: Selly Prima Desweni
E-mail: selly.prima@gmail.com

A B S T R A C T

The establishment of village-owned enterprises (BUMKam) was initiated as a driving force for the village economy and a desire for the welfare of the community. This is because the community's need for a high economy. This study aims to determine and analyze the role of BUMKam in increasing village original income (PAK). The author took 8 BUMKam in Tualang District. The data in this study were taken from secondary data and primary data obtained from the annual BUMKam financial reports and conducted in-depth interviews with 24 informants, namely village chiefs and BUMKam managers. This study uses a quantitative descriptive analysis method by analyzing maps and describing data. Based on the results of the study, it was illustrated that in increasing the village's original income it was influential but not significant and there were still obstacles that occurred. For this reason, the authors suggest that BUMKam be able to further increase revenue in the following year by continuing to develop its business units and it is hoped that it can increase community empowerment in the future.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menentukan secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Budiono, 2015). Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan (Tomisa & Syafitri, 2020).

Strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan di kawasan pedesaan. Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa: "Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" (Ramadana et al., 2013).

Berdasarkan realitas di atas, lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau di singkat BUMDes merupakan penugasan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royongan untuk mendayagunakan segala potensi

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes). Nihayah et al (2021) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa tujuan pemerintah membentuk BUMDes sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi desa yang kemudian masuk ke pendapatan desa sehingga eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan badan usaha milik desa optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. Badan usaha milik desa sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha desa (Dewi, 2014).

Menurut Nursetiawan (2018) menyebutkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

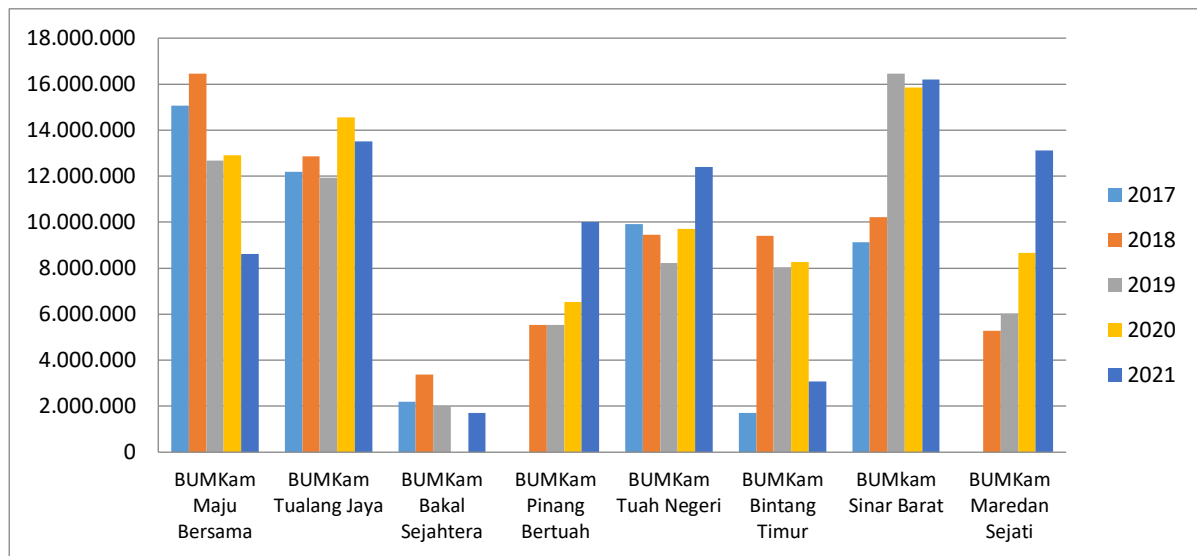
Jika BUMDes mampu berjalan dengan baik, terlebih mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi pengangguran, maka kedepannya desa akan semakin sejahtera dan mandiri sehingga ketika BUMDes berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik oleh pengelola yang jujur serta benar dalam pelaksanaannya maka akan menimbulkan kemandirian desa (Saman, 2016).

Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dari 8 kampung yang biasa disebut desa, sekarang namanya sudah berubah nomenklatur nya bahwasannya penyebutan nama desa berubah menjadi nama kampung. Di Kabupaten Siak, untuk kepala desa sudah berubah penyebutannya dari kepala desa menjadi penghulu, kemudian kampung tualang serta sudah berubah penyebutannya dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) yang didasarkan pada UU Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.1 tahun 2015 tentang Perubahan Nama Desa menjadi Kampung serta turunannya.

Masalah utama yang terjadi pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kecamatan Tualang yaitu usaha

simpan pinjam adanya kredit macet dari nasabah yang menunggak serta BUMKam Bintang Timur terdapat masalah internal terkait sumber daya manusia dalam aspek tenaga kerja BUMKam dari tahun 2020 sehingga BUMKam Kampung Pinang Sebatang Timur dan usaha yang dijalankan cenderung mati dan tidak beroperasi.

Menumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dengan usaha-usaha yang dijalankan tersebut dinilai sangat erat karena berhubungan langsung membantu masyarakat ekonomi lemah dalam penyediaan modal usaha dengan mudah, murah, ringan, dan cepat. Hal ini sesuai dengan salah satu indikator Pembangunan masyarakat desa, yaitu pemihakan dan pemberdayaan desa dalam rangka proses Pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kehadiran dan pelaksanaan program BUMKam di Kecamatan Tualang diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.



Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli kampung di Kecamatan Tualang

Sumber: Laporan BUMKam di Kecamatan Tualang, Tahun 2022.

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa pendapatan asli kampung Kecamatan Tualang, Pendapatan Asli Kampung mengalami grafik berfluktuasi diakibatkan peningkatan pendapatan yang tidak terlalu besar hanya 10% pertahun dari BUMKam. Hal ini bisa dilihat bahwa peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam peningkatan dan pembangunan desa agar menjadikan sebuah desa yang mandiri akan pengelolaannya. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana peranan suatu Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) untuk pembangunan desa melalui indikator Peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), Indeks Desa Membangun (IDM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) serta dilihat dari peninjauan lokasi atau jarak BUMKam dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan menganalisis peran BUMKam terhadap peningkatan pendapatan Asli Kampung sebagai perwujudan pembangunan desa yang dijalankan oleh suatu BUMKam untuk masyarakat desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana

peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis Deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif dari data-data yang dikumpulkan secara langsung dan menganalisis melalui proses *reduction* dan *verification*. Populasi kampung dan pengelola BUMKam diambil menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis sampling yang digunakan yaitu sampel jenuh atau sensus. Untuk memperoleh data yang diinginkan dan mencerminkan variabel penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang telah beroperasi selama kurang lebih 12 tahun. Badan usaha milik kampung merupakan pilar kegiatan ekonomi di kampung yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersial

(commercial institution). Badan usaha milik kampung sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan layanan sosial yang memiliki tujuan pendirian BUMKam antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Badan usaha milik kampung hadir dalam mewadahi masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kehadiran BUMKam di Kecamatan Tualang meningkatkan kalitas sumber daya manusia di kampung dan juga terus menerus harus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan terutama dalam hal usaha sehingga di masyarakat desa dapat tercipta masyarakat yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berkualitas.

Peran BUMKam bukan hanya sekedar menghasilkan sebuah pendapatan asli kampung, namun yang terpenting disini bagaimana peran badan usaha milik kampung di Kecamatan Tualang dapat membuka lapangan pekerjaan sebenar-benarnya dan memberikan dampak baik bagi pemerintah kampung sebagai sumber PAK. Pendapatan asli kampung memiliki sumber dana berasal dari beberapa aset yang dimiliki kampung setempat dan salah satunya Badan Usaha Milik Kampung. Seperti yang diungkapkan oleh Penghulu Kampung Maredan Barat, pendapatan asli kampung ini berasal dari kebun desa, pasar desa, dan BUMKam.

Hal ini juga diungkapkan oleh Penghulu Kampung Tualang dan Penghulu Kampung Tualang Timur, di mana BUMKam dan pasar desa menjadi sumber pendapatan asli kampung. Pemerintah kampung bekerja sama dengan pengelola BUMKam untuk mengelola sumber pendapatan tersebut dengan baik guna meningkatkan pendapatan asli kampung, meskipun ada beberapa kendala.

Hal lain dikemukakan oleh Penghulu Kampung Maredan, Penghulu Kampung Pinang Sebatang, Penghulu Kampung Tualang Timur, dan Penghulu Kampung Perawang Barat, pada sumber pendapatan asli kampung hanya dari BUMKam sehingga pengelolaan BUMKam secara nyata dan baik sangat diperlukan untuk menambah pendapatan asli kampung. Namun, di Kampung Pinang Sebatang Timur, BUMKam saat ini tidak aktif, sehingga tidak ada sumber pendapatan asli kampung dari BUMKam.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMKam merupakan sumber pendapatan asli kampung yang penting, sejajar dengan keberadaan sumber pendapatan asli kampung lainnya, seperti kebun desa dan pasar desa. Terutama di beberapa kampung, keberadaan BUMKam sangat penting untuk mendukung peningkatan pendapatan asli kampung melalui unit usaha dijalankan, sehingga dapat menjaga kelangsungan ekonomi kampung serta mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah diberikan.

Sebagian besar modalnya BUMKam melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan dan bantuan keuangan oleh pemerintah provinsi. Tujuannya adalah untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan asli kampung (PAK).

Tabel 1. Modal Awal Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang

No	Kampung	BUMKam	Modal Awal
1	Perawang Barat	BUMKam Maju Bersama	500.000.000

2	Tualang	BUMKam Tualang Jaya	500.000.000
3	Tualang Timur	BUMKam Bakal Sejahtera	500.000.000
4	Pinang Sebatang	BUMKam Pinang Bertuah	500.000.000
5	Pinang Sebatang Barat	BUMKam Tuah Negeri	500.000.000
6	Pinang Sebatang Timur	BUMKam Bintang Timur	500.000.000
7	Maredan	BUMKam Sinar Barat	500.000.000
8	Maredan Barat	BUMKam Maredan Sejati	500.000.000

Sumber: Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang, 2023.

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah modal awal yang disediakan untuk mendirikan BUMKam di masing-masing kampung. Modal awal tersebut menunjukkan jumlah dana atau aset yang diinvestasikan dalam pembentukan BUMKam. Modal awal berdiri badan usaha milik kampung di Kecamatan Tualang sebesar Rp.500.000.000 bersumber dari dana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten pada tahun 2019.

Tahun 2019, pengalihan bantuan dana dengan penyaluran penyertaan modal yang dinamakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang setiap tahunnya BUMKam mengajukan melalui pemerintah kampung sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pembuatan, pengembangan serta perbaikan unit-unit usaha BUMKam yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli kampung mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur BUMKam di Kecamatan Tualang telah menyatakan hal ini dengan jelas, pemerintah kampung telah memberikan modal awal sebesar Rp. 500.000.000 untuk pembuatan dan pengembangan unit usaha simpan pinjam pada tahun 2010. Dana ini berasal dari dana Provinsi Riau. Mulai tahun 2019, penyaluran modal untuk BUMKam dilakukan melalui modal dana BKK (Badan Keuangan Khusus) untuk pengembangan usaha-usaha lain yang sesuai dengan potensi kampung atau perdagangan.

Dengan demikian, BUMKam di Kecamatan Tualang berjalan dengan baik, dengan sektor perdagangan sebagai sektor utama meskipun beberapa kampung lebih maju di sektor pertanian. Modal dan penyertaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah desa berperan penting dalam pengembangan BUMKam dan usaha-usaha yang dilakukannya. simpulkan bahwa dengan adanya badan usaha milik kampung terdapat perubahan pada ekonomi pedesaan karena adanya unit usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik kampung dan juga terdapat modal perkreditan mikro yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau pengembangan usahanya sehingga di desa terjadi perputaran ekonomi serta juga adanya penyaluran modal untuk membantu pengembangan BUMKam itu mulai dari dikucurkan modal awal, selanjutnya setiap tahun pengajuan bantuan dana BKK pada pemerintah kampung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten disalurkan kepada BUMKam dalam bentuk penyertaan modal yang masing- masing kampung di Kecamatan Tualang berbeda sehingga perputaran keuntungan yang didapat juga ada yang untung dan ada yang tidak. BuMKam memiliki

peran penting dalam memberikan manfaat, tidak hanya dalam membantu pemerintah kampung meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK), tetapi juga dalam memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat dan menciptakan peluang kerja di BUMKam yang dijangar dan diserap melalui masyarakat setempat di Kecamatan Tualang.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang

No	Kampung	BUMKam	Tenaga Kerja
1	Perawang Barat	BUMKam Maju Bersama	10 Orang
2	Tualang	BUMKam Tualang Jaya	9 Orang
3	Tualang Timur	BUMKam Bakal Sejahtera	6 Orang
4	Pinang Sebatang	BUMKam Pinang Bertuah	6 Orang
5	Pinang Sebatang Barat	BUMKam Buah Negeri	10 Orang
6	Pinang Sebatang Timur	BUMKam Bintang Timur	-
	Maredan	BUMKam Maredan Sejati	7 Orang
8	Maredan Barat	Bumkam Sinar Barat	4 Orang

Sumber: Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 10 orang tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan BUMKam Maju Bersama, terdapat 9 orang tenaga kerja yang bekerja di BUMKam Tualang Jaya, terdapat 6 orang tenaga kerja yang terlibat dalam BUMKam Bakal Sejahtera, terdapat 6 orang tenaga kerja yang bekerja di BUMKam Pinang Bertuah, terdapat 10 orang tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan BUMKam Buah Negeri, tidak ada tenaga kerja yang terlibat dalam BUMKam Bintang Timur, BUMkam Maredan Sejati terdapat 7 orang tenaga kerja yang bekerja, dan BUMKam Sinar Barat terdapat 4 orang tenaga kerja.

Berdasarkan hal tersebut, diperkuat oleh pernyataan direktur BUMKam Buah Negeri di Kecamatan Tualang bahwa untuk penyerapan tenaga kerja dilakukan penjangkaran melalui pemilihan oleh tokoh masyarakat bersifat acak tergantung pendekatan pada masyarakat.

Direktur BUMKam Sinar Barat dan BUMKam Maredan Sejati mengungkapkan bahwa dalam penerimaan tenaga kerja di BUMKam melalui tes tertulis dan komputer serta dinilai sesuai dengan nilai tertinggi.

Direktur BUMKam Bakal Sejahtera menyatakan bahwa tenaga kerja yang diserap tidak melalui penjangkaran karena tidak ada yang bersedia bekerja di BUMKam karena waktu itu belum ada gaji.

Penyerapan tenaga kerja tergantung pada jenis unit usaha yang ada. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan bidang usaha masing-masing unit. Namun, penyerapan tenaga kerja tidak terlalu banyak yang penting memiliki kinerja yang bagus, tenaga kerja yang bisa diserap hanya sekitar 5-10 orang.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa BUMKam memang menyerap tenaga kerja dari masyarakat, tetapi hal ini juga bergantung pada pertimbangan BUMKam karena mereka memerlukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan unit usaha yang dijalankan. Jika BUMKam merekrut tenaga kerja sebanyak mungkin tanpa memperhatikan pembagian kerja, hal ini menjadi pertanyaan tentang bagaimana BUMKam mengelola sumber daya manusia.

Keuntungan usaha Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) memberikan bagi hasil menurut peraturan desa yang sudah disepakati antara desa dan pengelola BuMKam, secara gambarannya alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada BUMKam di Kecamatan Tualang untuk APBKam sebagai PAK kerja, kemudian untuk sebagai memotivasi nasabah dan anggota, ada bonus anggota, kemudian ada bonus pelaku, yaitu adanya insentif yang diterima oleh pengelola bumkam dari komisaris, badan pengawas, tokoh perempuan, direktur, staff, sekretaris, bendahara kemudia untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan, pembiayaan MKPT, kemudian untuk cadangan modal. Berikut persentase pembagian hasil dari BUMKam pada PAK sebagai kontribusi BUMKam setiap tahunnya.

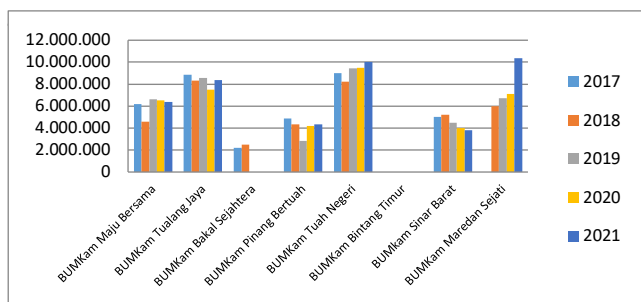
Tabel 3. Persentase Kontribusi BUMKam di Kecamatan Tualang

No	BUMKam	Persen (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	BUMKam Maju Bersama	10%	10%	10%	10%	10%
2	BUMKam Tualang Jaya	10%	10%	10%	10%	10%
3	BUMKam Bakal Sejahtera	10%	10%	-	-	-
4	BUMKam Pinang Bertuah	10%	10%	10%	10%	10%
5	BUMKam Buah Negeri	10%	10%	10%	10%	10%
6	BUMKam Bintang Timur	10%	10%	10%	10%	10%
7	BUMkam Sinar Barat	10%	10%	10%	10%	10%
8	BUMKam Maredan Sejati	10%	10%	10%	10%	15%

Sumber: Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang, 2023.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa persentase kontribusi pada BUMKam di Kecamatan Tualang rata-rata sama setiap tahunnya sebesar Rp. 10% dari hasil usaha yang dijalankan dengan juknis masing-masing BUMKam sehingga pada tahun 2022 meningkat menjadi 20%, maka dari itu semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Kampung yang diberikan BUMKam.

Selama periode 2017-2020, Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) membagikan 10% dari hasil usaha kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), hal ini berdasarkan pernyataan 7 Bendahara BUMKam di Kecamatan Tualang. Rinciannya adalah 10% untuk tahun 2017, 10% untuk tahun 2018, 10% untuk tahun 2019, dan 10% untuk tahun 2020. Pada tahun 2021, persentase pembagian hasil BUMKam 10%, akan tetapi BUMKam Maredan Sejati persentase bagi hasilnya tahun 2021 sebesar 15% karena hasil usaha BUMKam juga mengalami peningkatan dalam perkembangan usahanya.



Gambar 2. Grafik Kontribusi Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang

Sumber: Laporan Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang, 2023.

Berdasarkan tabel 3 dan gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa bagi hasil BUMKam di Kecamatan Tualang cenderung mengalami peningkatan. Pada BUMKam Maju Bersama, rata-rata mengalami peningkatan dari tahun 2017 kurang lebih Rp.2.000.000, BUMKam Tualang Jaya, BUMKam Bakal Sejahtera, BUMKam Sinar Barat dan BUMKam Pinang Bertuah tidak terlalu mengalami banyak peningkatan yang signifikan, BUMKam Mardan Sejati mengalami peningkatan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000, kemudian BUMKam Buah Negeri mengalami peningkatan kurang lebih Rp.1.000.000, kemudian untuk sebagai memotivasi nasabah dan anggota, ada bonus anggota, kemudian ada bonus pelaku yaitu adanya insentif yang diterima oleh pengelola bumkam dari komisaris, badan pengawas, tokoh perempuan, direktur, staff, sekretaris, bendahara. Kemudian untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembiayaan MKPT, dan juga untuk cadangan modal. Berikut persentase pembagian hasil dari BUMKam pada PAK sebagai kontribusi BUMKam setiap tahunnya.

Peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK) di Kecamatan Tualang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang diperoleh melalui wawancara dengan penghulu kampung, direktur, sekretaris, dan bendahara BUMKam, untuk melihat peran BUMKam dalam pengelolaannya sebagai upaya peningkatan pendapatan asli kampung sesuai dengan kampung setempat di Kecamatan Tualang.

Dalam perjalanannya BUM Desa ada yang sukses, namun ada pula yang berjalan di tempat atau gagal dan bahkan ada yang belum memulai sama sekali. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen usaha sebagai sebuah lembaga usaha yang berwatak bisnis (komersial) dan juga sosial sangat besar (Prawitno et al., 2019).

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa (Caya & Rahayu, 2019). Dalam pendapatan asli kampung terdapat sumber-sumber pendapatan yang menunjang peningkatan pendapatan asli kampung. Pada kampung di kecamatan terdapat beberapa sumber pendapatan asli kampung yaitu kampung Perawang Barat, kampung Pinang Sebatang, kampung Pinang Sebatang Barat, kampung Maredan, kampung Pinang Sebatang Timur bersumber dari BUMKam, sedangkan kampung Tualang dan kampung Tualang Timur

bersumber dari pasar desa dan BUMKam dan kampung Maredan Barat bersumber pasar desa, BUMKam dan kebun desa. Sehingga sebagian kampung mengharapkan penambahan pendapatan dari badan usaha milik kampung yang dimiliki. Arifin et al (2020) mengatakan bahwa pendanaan diperlukan sebagai modal untuk membangun, mengelola, dan bahkan merevitalisasi BUMDes. keberadaan dana desa menjadi salah satu sumber pendanaan atau permodalan bagi pemerintah desa untuk mengelola BUMDes. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik kampung di Kecamatan Tualang, setiap BUMKam dihadapkan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses kegiatan, antara lain untuk modal menjalankan unit usaha berguna untuk menghasilkan keuntungan usaha.

BUMKam di Kecamatan Tualang mendapatkan bantuan modal sebagai biaya produksi awal, mulai tahun 2007 dari pemerintah provinsi untuk menjalankan yang sebelumnya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UiEiD-SP) sebesar Rp.500.000.000, selanjutnya pemerintah provinsi dari tahun 2019-2022 mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang setiap tahunnya BUMKam pada masing-masing di Kecamatan Tualang mengajukan bantuan keuangan sesuai yang dibutuhkan.

Modal awal digunakan oleh Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang berguna untuk menjalankan unit usaha simpan pinjam yang masih berkembang sampai sekarang guna membantu masyarakat membuat dan mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Dalam mengajukan pinjaman dibutuhkan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat berupa fotocopy kartu keluarga, KTP, adanya agunan (jaminan) serta harus memiliki usaha dengan jumlah pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000-Rp. 15.000.000, Adapun beberapa BUMKam menekankan masyarakat peminjam, BUMKam Maju Bersama untuk mengurus surat keterangan memiliki usaha dari penghulu kampung dan BUMKam Tualang Jaya mengharuskan peminjam mengisi proposal khusus usaha. Sejalan dengan penelitian Irianty (2021) bahwasanya Kriteria pemberian bantuan modal ini hanya berlaku untuk masyarakat asli dari desa yang benar-benar membutuhkan serta masyarakat yang ingin membuka usaha dan mengembangkan usaha yang sudah ada. Sebelum bantuan modal dicairkan, masyarakat diwajibkan membuat surat pengajuan bantuan modal secara tertulis beserta jumlah bantuan yang diinginkan yang akan disetujui oleh pengurus BUMDes. Pada BUMKam Maju Bersama jumlah peminjam sebanyak 1.113 orang dengan total peminjaman Rp. 9.057.109.536, BUMKam Tualang Jaya jumlah peminjam sebanyak 631 orang dengan total peminjaman Rp. 6.194.137.000, BUMKam Bakal Sejahtera jumlah peminjam hanya sekitar 25 orang dengan total peminjaman, BUMKam Pinang Bertuah jumlah peminjam sebanyak 95 orang dengan total peminjaman Rp. 836.000.000, kemudian BUMKam Buah Negeri total peminjam sebanyak 1.206 orang dengan total peminjaman Rp. 12.220.515.000, BUMKam Bintang Timur pada saat sebelum vakum memberikan manfaat kepada masyarakat dan menggantungkan diri pada BUMKam tersebut, BUMKam Maredan Sejati jumlah peminjam sebanyak 546 orang dengan total peminjaman Rp. 8.523.850.000 serta BUMKam Sinar Barat jumlah peminjam sebanyak 864 orang dan total peminjaman Rp. 4.974.898.000 sehingga pendapatan dan modal pada usaha perdagangan di BUMKam mengalami perkembangan signifikan meningkat serta pendapatan asli kampung turut meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengelolaan Badan usaha Milik Kampung (BUMKam) meliputi mengelola unit usaha, mengelola keuangan, mengelola administrasi serta mengawasi keberjalanannya membutuhkan tenaga kerja pengelola yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sehingga perkembangan BUMKam lebih optimal, dibuktikan dengan setiap penyaringan tenaga kerja BUMKam di Kecamatan Tualang diawasi oleh pengelola BUMKam agar tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan berjalannya serta BUMKam sedikit membantu mengurangi tingkat pengangguran pada masing-masing di Kecamatan Tualang dengan memberikan peluang kerja kepada warga yang telah menyelesaikan sekolah belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun jumlahnya terbatas, kontribusi BUMKam ini berarti dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sesuai dengan pendapat [Ibrahim et al \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa BUMDes mampu menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, perlu menyadari bahwa kontribusi yang diberikan oleh BUMKam dalam menciptakan lapangan kerja belum terlalu signifikan. BUMKam hanya memiliki 6-10 pekerja yang dapat bekerja di setiap BUMKam di Kecamatan Tualang. Hal ini disebabkan oleh skala kecilnya badan usaha BUMKam dan persyaratan kualifikasi tenaga kerja yang spesifik. BUMKam membutuhkan pekerja dengan keahlian khusus dalam bidang teknis dan teknologi informasi. Selain itu, mayoritas usaha yang dijalankan oleh BUMKam bergerak di sektor perdagangan dan jasa, bukan di sektor produksi akan tetapi pada BUMKam di Kecamatan Tualang dalam penyerapan tenaga kerja sudah melalui proses cukup baik dengan melakukan tes tertulis dan tes komputer akan tetapi berbeda dengan BUMKam Tuah Negeri dalam pemilihan tenaga kerja BUMKam melalui pemilihan oleh tokoh masyarakat bukan melalui direktur BUMKam sehingga tenaga kerja yang didapat kurang sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ([Gayo et al 2020](#)) mengungkapkan bahwa kontribusi yang diberikan BUMDes dalam hal membuka lapangan pekerjaan belum terlalu besar, dari hampir 2 tahun berjalannya BUMDes hanya sebanyak 12 orang saja yang dapat bekerja di BUMDes mengingat BUMDes ini terbilang baru beroperasi dan juga masih dalam tahap pengembangan unit-unit usahanya.

Akan tetapi terdapat permasalahan tenaga kerja pada BUMKam Bintang Timur yaitu adanya penyalahgunaan dana oleh pengelola BUMKam yang merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keuangan dan etika yang seharusnya dijalankan. Tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum, melanggar prinsip akuntabilitas, atau melanggar tugas

fidusia yang melekat pada pengelolaan dana publik atau dana yang dipercayakan, sesuai dengan pernyataan Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur bahwa Badan Usaha Milik Kampung akibat tanggungjawab dalam pengelolaan BUMKam dan tidak amanah dalam memegang keuangan dengan kerugian mencapai Rp.356.957.400 menyebabkan kegiatan BUMKam terhenti serta masyarakat yang menggantungkan diri kepada BUMKam jadi terganggu.

Persentase Kontribusi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kecamatan Tualang bukan di pengaruhi oleh seberapa besar nominal hasil usaha yang didapatkan untuk dibagi hasil pada PAK melainkan persentase kontribusi sudah ditentukan dalam bentuk persen sebesar 10% melalui wewenang

pemerintah daerah dan musyawarah kampung. Dapat dibuktikan bahwa omzet hasil usaha yang sudah besar tetapi kontribusi PAK tetap sama sehingga pendapatan asli kampung meningkat namun sedikit.

Seluruh Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang telah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kampung melalui kontribusi bagi hasil namun belum signifikan, kontribusi BUMKam yang dihasilkan tersebut berasal unit-unit usaha yang dijalankan seperti jenis usaha UEK-SP, perdagangan, jasa, peternakan, pasar dan sebagainya, diantara unit-unit usaha tersebut yang sangat berperan sangat penting oleh beberapa kampung dalam meningkatkan PAK adalah unit usaha simpan pinjam dan unit usaha dagang. Hal ini dikarenakan unit simpan pinjam memiliki dana yang lebih besar dan unit usaha dagang yang banyak diminati masyarakat serta kedua unit tersebut memiliki timbal balik yang bagus. Berbeda dengan unit usaha UEK-SP di BUMKam Tualang Timur mengalami penunggakan oleh masyarakat mencapai Rp. 400.000.000 sehingga proses berjalan BUMKam tidak maksimal cara memfasilitasi pembangunan usaha dan membantu sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BUMDes didirikan antara lain dalam peningkatan Asli Desa (PADes). Dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMKam mampu memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan asli kampung dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini senada dengan penelitian [Mardiyanti et al \(2018\)](#) menyatakan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sudah dirasa cukup maksimal ini dibuktikan dari Persentase Kontribusi dari Bagi Hasil BUMDes Bangun Bersama dengan Pendapatan PADes nya yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan adanya unit-unit usaha yang ada salah satunya simpan pinjam.

Pendapatan Asli Kampung sangat penting bagi perekonomian kampung salah satunya dalam hal pembangunan desa. Sesuai dengan penelitian [Setyaningsih \(2014\)](#) menyatakan desa-desa harus mengupayakan sumber-sumber pendapatan desa agar dapat meningkat sehingga mampu membiayai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang telah di jabarkan mendapatkan kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang ada di Kecamatan Tualang yaitu BUMKam Maju Bersama, BUMKam Tuah Negeri, BUMKam Pinang Bertuah, BUMKam Tualang Jaya, BUMKam Maredan Sejati, BUMKam Bakal Sejahtera, BUMKam Sinar Barat dan BUMKam Bintang Timur mengalami peningkatan usaha dan modal yang signifikan pada simpan pinjam yang sudah berjalan 15 tahun dan sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat akan tetapi BUMKam Bakal Sejahtera mengalami penurunan kualitas dari usaha simpan pinjam dan Penyerapan tenaga kerja pada BUMKam di Kecamatan sudah cukup menyerap tenaga kerja kecuali BUMKam Sinar Barat yang menghadapi kendala kekurangan SDM berkualitas melalui tes tertulis tetapi BUMKam Tuah Negeri masih menggunakan sistem kaku yaitu melalui pemilihan tenaga kerja oleh tokoh masyarakat. BUMKam di Kecamatan Tualang pendapatan asli kampung sudah dikatakan meningkat, meski dari tahun ke tahun terkadang ada peningkatan dan penurunan pendapatan. Maka peranan BUMKam juga sangat sangat berpengaruh positif

terhadap peningkatan perekonomian masyarakat salahsatunya kontribusi Usaha Ekonomi Kampung (UEK-SP), usaha perdagangan dan usaha jasa. Dengan adanya peningkatan usaha tersebut selain dapat menopang perekonomian masyarakat desa dan keuangan desa yang akan tetapi mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK). Oleh karena itu Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kecamatan Tualanh sangat berperan namun tidak signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kampung di Kecamatan Tualang dikarenakan Sebagian besar usaha yang dijalankan oleh BUMKam mendapatkan keuntungan besar hanya pada usaha simpan pinjam serta bagi hasil pendapatan usaha diberikan besarnya sudah ditentukan melalui peraturan desa sebesar 10% serta dalam daya serap tenaga kerja berkualitas yang sesuai masih ada belum tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedji, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79(August), 382–394.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro. *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 1–12.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, V(1), 1–14.
- Gayo, S. B., Erlina, & Rujiman. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 202–209.
- Ibrahim, I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 21(3), 349–354.
- Irianty, I. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Suka Ramai Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. In *Skripsi Universitas Muhammad Sumatera Utara*.
- Mardiyanti, M., Syah, A. L. N., & Purwitasari, E. (2018). Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 1–8.
- Nihayah, F. L., Moehadi, & Mustofa, M. (2021). Peranan Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 4(1), 36–43.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Prawitno, A., Rahmatullah, & Safriadi. (2019). Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6).
- Saman. (2016). *Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tomisa, M. E., & Syafitri, M. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 91–101. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.219>